

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	vi
PERSETUJUAN TESIS	vii
PENGESAHAN PENELITIAN TESIS	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori (atau Kerangka Konsep)	10
E. Definisi Konsep	26
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Penulisan	34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DALAM PERDAGANGAN KARANG HIAS

A. Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007	
1. Dasar Perubahan atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007...	37
2. Tujuan Perubahan Undang-undang No.27 Tahun 2007	42
a. Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil	42
b. Mengatur Kegiatan Usaha Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	45
1). Perdagangan Karang Hias	45

2). Penanambangan Pasir Laut	50
c. Pemanfaatan Wilayah Pesisir	56
B. Letak Geografis Terumbu Karang di Indonesia	
1. Sejarah Terbentuknya Terumbu Karang	62
2. Sebaran Terumbu Karang di Dunia	
a. Laut Karibia	66
b. Samudera Hindia	66
c. Kepulauan Indonesia	67
3. Ekosistem Terumbu Karang	68
4. Fungsi dan Manfaat Terumbu Karang	72
5. Status Terumbu Karang Indonesia	73
6. Elemen Utama dari Terumbu Karang	74
7. Jenis-jenis Terumbu Karang	77
8. Terumbu Karang Merupakan Bagian dari Ekosistem	83

BAB III TINJAUAN NORMATIF ATAS PERATURAN-PERATURAN YANG MENGATUR PERDAGANGAN KARANG HIAS

A. Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	87
1. Zona Ekonomi Eksklusif Perikanan	88
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum Perikanan	90
3. Peraturan-peraturan yang Berkaitan Dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2014	91
4. Sanksi Pidana Perikanan	96
B. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1. Sistem Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup ...	96
2. Dampak dari Perubahan Iklim	97
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	98
4. Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup	101

5. Perizinan Sebagai Instrumen Pengendalian	103
6. Peraturan-peraturan Yang Berkaitan Dengan Karang Hias..	103
C. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
1. Pemberdayaan Nelayan	108
2. Kewajiban Negara	109
D. Undang-undang N0. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya	
1. Tanggung Jawab Konservasi	112
2. Peraturan-peraturan Yang Mengatur Konservasi	115
E. Undang-undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	
1. Undang-undang Penyelenggaraan Karantina	117
2. Tujuan dari Penyelenggaraan Karantina	119
3. Tindakan Karantina	121
F. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang	
1. Kerusakan Terumbu Karang	124
2. Kriteria Kerusakan Terumbu Karang	124
3. Status Kerusakan Terumbu Karang	124
4. Status Kondisi Terumbu Karang	124
5. Program Pengendalian Kerusakan Terumbu Karang	125

G. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut	
1. Pengertian UPT	126
2. Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis	126
H. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	
1. Ruang Lingkup Rehabilitasi	127
2. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemeliharaan Rehabilitasi.	128
I. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 Tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Ikan Yang Tercantum Dalam Appensiks Convention On International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITIES).	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup CITES	129
2. Kategori CITES Karang Hias.	130
J. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 59 / KEP-B KIPM/ 2016 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kesehatan Haisil Perikanan.	
1. Teknis Sertifikasi	133
2. Sertifikat Kesehatan	134
3. Definisi-definisi Unit Pelayanan Sertifikasi	134
4. Sarana Peralatan dan bahan kerja Ruang pelayanan	135
5. Ruang Lingkup Sertifikat Kesehatan Mutu	136
6. Prosedur Permohonan Penerbitan Sertifikat Kesehatan ...	137

K. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal	
1. Jenis-jenis Bidang Usaha	145
2. Penanaman Modal	146
3. Bentuk Bidang Usaha	146
4. Bidang usaha Yang Tertutup	147
L. Keputusan Presiden nomor 103 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen	
1. Kedudukan LIPI dalam Pemerintahan	148
2. Kewenangan LIPI dalam Perdagangan Karang Hias	151
3. Peran COREMAP-CTI LIPI	155
M. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	
1. Kewenangan Terhadap Barang Lartas	159
2. Barang Larangan Terbatas (Lartas)	164
N. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor. KM.67/UM.001/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pilau Kecil	
1. Negara Kepulauan	165
2. Sektor Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat.....	166
3. Batasan Peristilahan	167
4. Pengembangan Pariwisata di pulau-pulau kecil	168
O. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.	

1. Pengelolaan konservasi	169
2. Ruang Lingkup Konservasi	170
3. Otoritas Pengelolah	173
P. Deklarasi Rio 1992 (Precaunary Principle)	
1. Sejarah Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle) ..	175
2. Pengertian Prinsip Kehati-hatian	176
3. Kelebihan dan Kekurangan Prinsip Kehati-hatian.....	177

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Yang Mengatur Perdagangan Karang Hias

1. Dasar Hukum	179
2. Kepastian Hukum.....	184

B. Perlindungan Hukum Terumbu Karang

1. Hukum Nasional	189
2. Hukum Internasional	192
3. Penegakan Hukum Terumbu Karang	
a. Badan Hukum Yang Berwenang.....	195
b. Penegakan Hukum Terumbu Karang.....	200
c. Azas Precaunary Principle	205
d. Sumber Hukum Ekosistem Terumbu Karang	209

C. Kerusakan Terumbu Karang

1. Faktor Alam	211
2. Faktor Manusia	213

D. Investasi Karang Hias

1. Daftar Negatif Investasi	222
2. Perbandingan Hasil Investasi dan Konservasi	223
3. Karang Hias Transpalansi	
a. Budidaya Karang Hias	226
b. Pengawasan Budidaya Karang di Indonesia	212
c. Audit Perusahaan Budidaya	230
4. Perdagangan Karang Hias Indonesia	232
5. Negara Tujuan Ekspor Karang Hias Indonesia	233
E. Manfaat Terumbu Karang	
1. Bagi Ekosistem Alam	235
2. Sumber Ekonomi Wilayah Pesisir	
a. Masyarakat Nelayan	238
b. Industri Pariwisata	242
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	254
B. Saran	260
DAFTAR PUSTAKA	262
LAMPIRAN-LAMPIRAN	269
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	272